

KODE ETIK INSINYUR DALAM PELAKSANAAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA UMKM PROGRAM PEN KAB. BANYUMAS

Irawadi¹, Iwan Rustendi², Bakti Gunarto³

¹ Dosen Fakultas Pertanian, Unsoed Purwokerto dan Pengurus Cabang PII Banyumas

² Dosen Fakultas Teknik Unwiku Purwokerto dan Pengurus Cabang PII Banyumas

³ Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dan Pengurus Cabang PII Banyumas

Email : irawadi.dpu@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah, senilai Rp 191 milyar ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata dan pengembangan UMKM serta diharapkan terjadi 'multiplier effect' terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pasca covid19 melalui Pembangunan infrastruktur Pariwisata dan UMKM.

Melihat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dengan kompleksitas dan waktu pelaksanaan yang terbatas, maka review pelaksanaan kegiatan ini sangat dibutuhkan mulai dari tahapan perencanaan; pengadaan barang/jasa, pelaksanaan konstruksi sampai dengan monitoring evaluasi yang meliputi kesiapan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia; sarana prasarana; metode serta aturan yang mendasarinya, termasuk peran organisasi Persatuan Insinyur Indonesia (PII) khususnya pengetahuan keinsinyuran (sains dan teknologi) menitikberatkan pada 'etika profesi Insinyur', melalui Kode Etik Insinyur Indonesia dalam Sapta Dharma Insinyur Indonesia.

Dari rumusan masalah; tujuan; manfaat; ruang lingkup; identifikasi masalah dan hambatan; analisis penanganan masalah; evaluasi dan tindak lanjut; hasil kajian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa proses pembangunan infrastruktur Pariwisata UMKM Program PEN 2021 Kabupaten Banyumas dapat terbangun, dapat difungsikan, walau sebagian perlu kelengkapan lanjutan; keterbatasan waktu pelaksanaan dimungkinkan terjadi kesalahan/ kelemahan administrasi teknis dan pemeriksaan oleh badan pemeriksa internal eksternal berpendapat tidak terjadi penyimpangan anggaran merugikan keuangan negara serta Sapta Dharma (Tujuh Tuntutan Sikap dan Prilaku) sebagai Kode etik Seorang Insinyur Indonesia sudah dilaksanakan, belum sempurna, dan perlu ada pembelajaran bersama mengenai hal ini.

Kata kunci: Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah; Pembangunan Infrastruktur Pariwisata UMKM; Kode Etik InsinyurIndonesia

Abstract

The Banyumas Regency Government entered into a Loan Agreement with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) in the Regional National Economic Recovery Program (PEN), worth Rp 191 billion aimed at increasing regional original income (PAD) from the tourism sector and UMKM development and is expected to have a 'multiplier effect' on improving the community's economy after

Covid19 through Tourism and UMKM infrastructure development.

Seeing the success of the implementation of activities with complexity and limited implementation time, a review of the implementation of this activity is urgently needed starting from the planning stage; procurement of goods/services, construction implementation to evaluation monitoring which includes the readiness of the quantity and quality of human resources; infrastructure; methods and underlying rules, including the role of the Indonesian Engineers Association (PII) organization, especially engineering knowledge (science and technology) focuses on 'professional ethics of engineers', through the Indonesian Engineers Code of Ethics in the Sapta Dharma Insinyur Indonesia.

From the formulation of the problem; purpose; benefit; scope; identification of problems and obstacles; analysis of problem handling; evaluation and follow-up; as a result of the study and discussion, it can be concluded that the process of developing UMKM Tourism infrastructure for the 2021 PEN Program in Banyumas Regency can be built, can be functional, although some need advanced completeness; Limited implementation time is possible There are errors/weaknesses in technical administration and audits by external internal audit bodies argue that there are no budget irregularities detrimental to the state finances and Sapta Dharma (Seven Demands of Attitude and Behavior) as the Code of Ethics of an Indonesian Engineer has been implemented, it is not perfect, and there needs to be a joint learning on this matter.

Keywords: *Regional National Economic Recovery Program (PEN); Tourism-UMKM Infrastructure Development; Code of Ethics for Indonesian Engineers*

1.PENDAHULUAN

Kabupaten Banyumas dengan ibukota kabupaten berada di wilayah perkotaan Purwokerto terletak di Jawa Tengah bagian Barat Daya, sangat strategis dan merupakan penghubung Jawa Barat-Jawa Tengah bagian Selatan. Pada Tanggal 30 Juli 2021, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) sebagai BUMN Kementerian Keuangan yang melakukan pengelolaan pinjaman anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah, senilai Rp 191 milyar ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata dan sektor pengembangan UMKM serta diharapkan terjadi ‘*multiplier effect*’ terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yang terpuruk pasca pandemik covid19, disamping dalam rangka antisipasi perkembangan positif terbangunnya bandara baru dan Pembangunan jalan tol Bandung-Yogyakarta.

Untuk pelaksanaan anggaran pinjaman PEN Daerah tersebut membutuhkan rencana pengelolaan yang ketat, karena anggaran Pinjaman PEN turun di Bulan Agustus 2021, dan sesuai dengan MOU dengan PT.SMI, waktu pelaksanaan sampai akhir 2021 (hanya tersedia waktu 4 bulan) dan dimungkinkan perpanjangan sesuai alasan teknis dan administrasi. Adapun infrastruktur yang direncanakan meliputi beberapa infrastruktur pariwisata dan UMKM yang dilaksanakan sebagian besar oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) meliputi Pembangunan Pusat Kuliner, UMKM dan Menara Pandang (110 milyar) dan Pengembangan Lokawisata Baturaden (34 milyar); disamping dilaksanakan juga oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk Pembangunan Taman Apung Mas Kemambang (29 milyar) dan Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) untuk Pembangunan Taman Botani dan Pintu Gerbang Baturaden (18 milyar).

Melihat kompleksitas dan waktu pelaksanaan yang terbatas, terutama kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas, maka Review pelaksanaan kegiatan ini dapat menggambarkan tentang pelaksanaan pengelolaan anggaran mulai dari tahapan perencanaan; pengadaan barang/jasa, pelaksanaan konstruksi sampai dengan monitoring evaluasi yang dilakukan yang meliputi kesiapan kuantitas dan kualitas SDM ; sarana prasarana; metode serta aturan yang digunakan.

Dari gambaran tersebut disampaikan rumusan masalah; tujuan; manfaat; ruang lingkup

pelaksanaan; identifikasi masalah dan hambatan; analisis penanganan masalah; evaluasi dan tindaklanjut; solusi serta dicapainya kesimpulan dan saran kedepan.

2. STUDI PUSTAKA

2.1 Dasar Teori

Ir. Habibie Razak, MM., IPM., ASEAN Engineer – Praktisi Keinsinyuran, Wakil Ketua Bidang Energi dan Kelistrikan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Periode 2012 – 2015 Persatuan Insinyur Indonesia (PII) adalah organisasi yang berdiri sejak Tahun 1952 didirikan oleh Bapak Ir. Djuanda Kartawidjaja dan Bapak Ir. Rooseno Soeryohadikoesoemo di Bandung, merupakan organisasi profesi tertua kedua di Indonesia setelah Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dalam sejarahnya PII telah banyak menelurkan cendekiawan-cendekiawan dan profesional-profesional yang memegang peranan penting di tanah air kita dalam beberapa dekade ini. PII di dalam menjalankan proses kaderisasi insinyur melalui continuous development program (CPD) yang isi programnya selain berisikan pengetahuan keinsinyuran (sains dan teknologi) juga menitikberatkan pada pengenalan dan pementapan pembahasan mengenai ‘etika profesi Insinyur’. Sarjana Teknik diharapkan setelah menjadi Anggota PII diwajibkan memegang teguh etika profesi keinsinyuran yang dituliskan dalam Kode Etik Insinyur Indonesia, Catur Karsa Sapta Dharma Insinyur Indonesia*.

Catur karsa adalah 4 prinsip dasar yang wajib dimiliki oleh Insinyur Indonesia antara lain: (1) mengutamakan keluhuran budi, (2) menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, (3) bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan (4) meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Saya membaca 4 prinsip dasar ini menyimpulkan Insinyur Indonesia dituntut menjadi insan yang memiliki integritas (budi pekerti luhur) dan semata-mata bekerja mendahulukan kepentingan masyarakat dan umat manusia dari kepentingan pribadi dengan senantiasa mengembangkan kompetensi dan keahlian engineeringnya.

Sapta Dharma adalah 7 tuntunan sikap dan perilaku Insinyur yang merupakan pengejawantahan dari catur karsa tadi antara lain: (1) mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, (2) bekerja sesuai dengan kompetensinya, (3) hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan, (4) menghindari pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya, (5) membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing, (6) memegang teguh kehormatan dan martabat profesi dan (7) mengembangkan kemampuan profesional. Apabila kita baca lagi lebih seksama, sapta dharma substansinya adalah sama dan seiring dengan catur karsa, bahwa Insinyur Indonesia dituntut untuk memegang teguh etika dan integritas di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di mana pun dia bekerja sehingga dia bisa tetap mempertahankan reputasi profesinya dari waktu ke waktu. Substansi utama kode etik Insinyur menurut saya tidak lain adalah etika dan integritas. Apa pun yang Insinyur lakukan entah itu dalam rangka pengembangan kompetensi keinsinyuran atau pun dalam rangka membangun hasil karya keinsinyuran tetap saja selalu mengacu pada prinsip etika dan integritas.

Penulis lebih dalam lagi mengupas salah satu tuntunan sikap dan perilaku Insinyur yakni membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Beberapa uraian dari sikap dan perilaku ini adalah antara lain: memprakarsai pemberantasan praktek-praktek kecurangan dan penipuan; tidak menawarkan, memberi, meminta atau menerima segala macam bentuk perlakuan yang menyalahi ketentuan dan prosedur yang berlaku, baik dalam rangka mendapatkan kontrak atau untuk mempengaruhi proses evaluasi penyelesaian pekerjaan. Dua uraian ini memaparkan betapa perlunya seorang Insinyur di dalam menjalankan praktek-praktek keinsinyuran mengikuti etika dan aturan hukum yang berlaku, on how the engineers should act. Insinyur dituntut untuk tidak tergoda dengan segala bentuk penyuapan atau gratifikasi atau bribe dalam istilah Inggris. Bahkan Insinyur dituntut untuk memkampanyekan anti-kecurangan, anti-penipuan termasuk anti-penyuapan dan berbagai bentuk korupsi dalam ruang lingkup organisasi di mana dia berada, ruang lingkup masyarakat, bangsa dan negara bahkan dalam ruang lingkup proyek-proyek internasional yang melibatkan banyak negara.

Kode etik profesi keinsinyuran yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia adalah sangat relevan dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945, seiring sejalan dengan program-program yang dicanangkan oleh lembaga -lembaga anti-korupsi di dalam mengurangi bahkan memberantas praktek-praktek korupsi di bumi

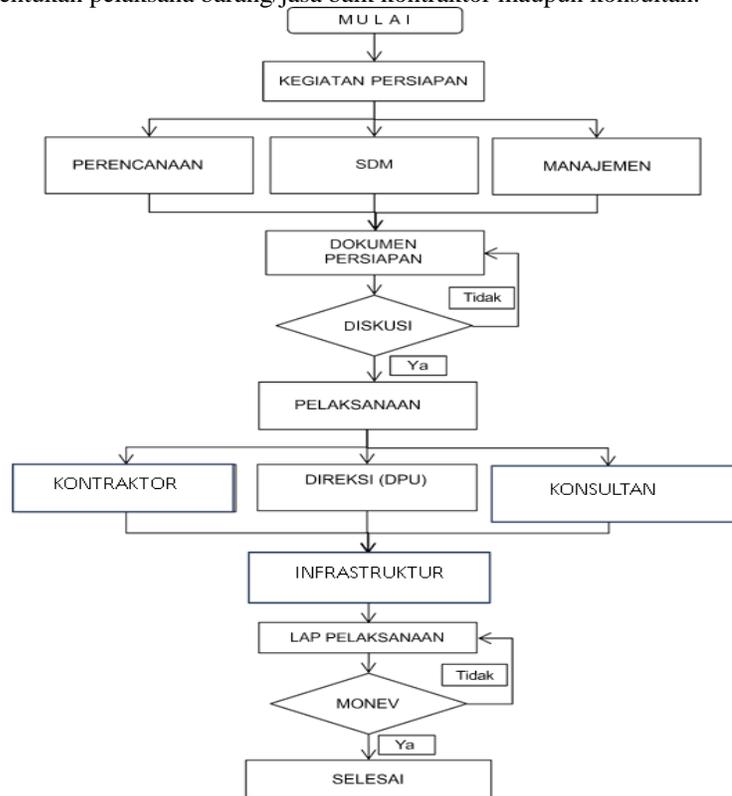
nusantara. Korupsi, suap dan segala bentuk lainnya bukan hanya mengganggu keberlanjutan pembangunan nasional Indonesia tetapi juga bisa menjadi contoh buruk dan tidak terpuji yang akan kita tularkan ke generasi penerus selanjutnya, sehingga menjadi tugas kita bersama, korupsi dan segala bentuknya ini harus diberantas dan dibumihanguskan dari tanah air tercinta. Kode etik Insinyur ini memang hanya berlaku untuk Insinyur Indonesia saja tetapi apabila semua anggota Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang selanjutnya diberi gelar sebagai Insinyur bisa memberikan keteladanan kepada profesi-profesi lainnya di Indonesia saya yakin ini bisa menjadi preseden positif di dalam menggiring bangsa ini menuju bangsa yang lebih sejahtera dan bermartabat.

3. METODE PELAKSANAAN

3.1 Bagan Alir Pelaksanaan

Bagan alir pelaksanaan dimulai setelah diterbitkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Pembangunan Pariwisata dan UMKM Anggaran PEN 2021. Dimulai dengan kegiatan persiapan meliputi kesiapan perencanaan (DED), kesiapan Tim Teknis dan SDM pengelola dan manajemen kegiatan (administrasi perizinan PBG dan Lingkungan; Surat Tugas dll.).

Kegiatan Persiapan diakhiri dengan tersusunnya Dokumen Persiapan dalam rangka pelaksanaan proses lanjutan meliputi : pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Lembaga Unit Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Banyumas yang akan menentukan pelaksana barang/jasa baik kontraktor maupun konsultan.



Kolaborasi dan Kerjasama yang baik antara Kontraktor-Direksi(DPU)-Konsultan Pengawas sesuai tanggungjawab dan kewenangan masing-masing dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan.

Hasil pembangunan infrastruktur yang telah selesai tetap perlu dilakukan monitoring dan evaluasi baik internal maupun eksternal pengelola kegiatan, sehingga tidak ada permasalahan yang muncul pasca konstruksi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan Pembangunan infrastruktur UMKM dan Kapariwisata Program PEN 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kawasan Jalan Bung Karno meliputi:
 - a. Paket 1 Gerilya-Sudirman (Pembangunan setra kuliner UMKM 2 lantai) Pembangunan Sentra Kuliner

- UMKM 2 lantai dapat diselesaikan tepat waktu, beberapa kendala yang muncul diantaranya perlu adanya perubahan desain atap (penyesuaian terhadap kondisi saat hujan); perubahan taman dan drainase di halaman.
- b. Paket 2 Gerilya Sudirman (Pembangunan taman Kawasan Menara pandang; Pembangunan Menara pandang tinggi 99 meter 5 lantai dan Pembangunan Gedung convension hall 2 lantai). Pembangunan Menara Pandang memerlukan kerjasama terpadu para pengelola kegiatan (Kontraktor-Konsultan Manajemen Konstruksi dan Direksi (DPU) karena terutama penetapan bentuk atap Teratai baru diputuskan saat pelaksanaan konstruksi, sehingga perencanaan teknis atap perlu Kerjasama antara kebutuhan estetika (arsitektur) dan metode pelaksanaan berhubungan dengan waktu pelaksanaan yang terbatas.
 - c. Paket 3 Pembangunan lahan parkir Menara pandang.
Tidak ada kendala yang berarti, hanya diperlukan waktu kesepakatan untuk luasan parkir, sirkulasi parkir dan penyesuaian anggaran diantaranya untuk penghijauan dan LPJU.
2. Kawasan Pengembangan Lokawisata Baturaden, meliputi:
- a. Paket 1 Indraprana;
 - b. Paket 2 Indraprana;
 - c. Paket 3 Indraprana;
 - d. Paket Bukit Bintang;
- Secara umum untuk Kawasan Pengembangan Lokawisata Baturaden dijumpai beberapa kendala yaitu :
- 1. kepastian lokasi yang masih perlu penyempurnaan;
 - 2. anggaran antar paket pekerjaan yang jadi satu kawasan sehingga perlu ada kepastian batasan, apalagi dijumpai satu paket kelebihan anggaran dan lainnya ada yang kurang anggaran.
 - 3. Ada item pekerjaan yang belum masuk di kontrak sehingga perlu penyesuaian



Gambar 1 : Paket 2 GS Menara Pandang (Menara Teratai)



Gambar 2. Paket Indraprana 1 Dan Paket Indraprana 2



Gambar 3. Paket Indraprana 3 dan Paket 2 GS - Convension Hall

5. KESIMPULAN

Melihat dan memperhatikan proses Pembangunan infrastruktur UMKM Pariwisata program PEN 2021 Kabupaten Banyumas dan hasil pembahasan serta pencapaiannya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses Pembangunan infrastruktur UMKM Pariwisata Program PEN 2021 Kabupaten Banyumas dapat diselesaikan dengan baik, Sebagian infrastruktur yang terbangun sudah dapat difungsikan Sebagian lagi belum dapat difungsikan karena perlu ada kelengkapan arsitektural dan menunggu pihak ketiga yang akan menyewa.
2. Waktu yang relative pendek (6 bulan) untuk proses Pembangunan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan perizinan menyebabkan kemungkinan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi ada kesalahan/ kelemahan.
3. Pengelolaan anggaran dan fisik teknis perlu pencermatan dan evaluasi dan ini sdh dilakukan oleh inspektorat, Aparat Penegak Hukum (APH) dan yang terakhir pemeriksaan BPK, dapat disimpulkan bahwa proses pembangunan anggaran PEN 2021 tidak terjadi penyimpangan anggaran merugikan keuangan negara.
4. Sapta Dharma (Tujuh Tuntutan Sikap dan Prilaku) sebagai Kode etik Seorang Insinyur Indonesia sudah dilaksanakan, walau belum sempurna, perlu ada pembelajaran bersama mengenai hal ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, “DAK Fisik Untuk Mendukung PC-PEN”,
DPU Kab Banyumas, Persiapan PEN; Buku Panduan PEN; Buku Laporan PEN; Purwokerto Januari
2023

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, “Penempatan Dana Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN)”, Workshop Sinkronisasi PEN, Jakarta 22 Maret 2021.

Irawadi, Tugas Profesionalisme Insinyur; Tugas Etika; Tugas Etika Profesi; Tugas K3L, Purwokerto
September 2023

Workshop Sinkronisasi PEN, Jakarta 26 Februari 2021